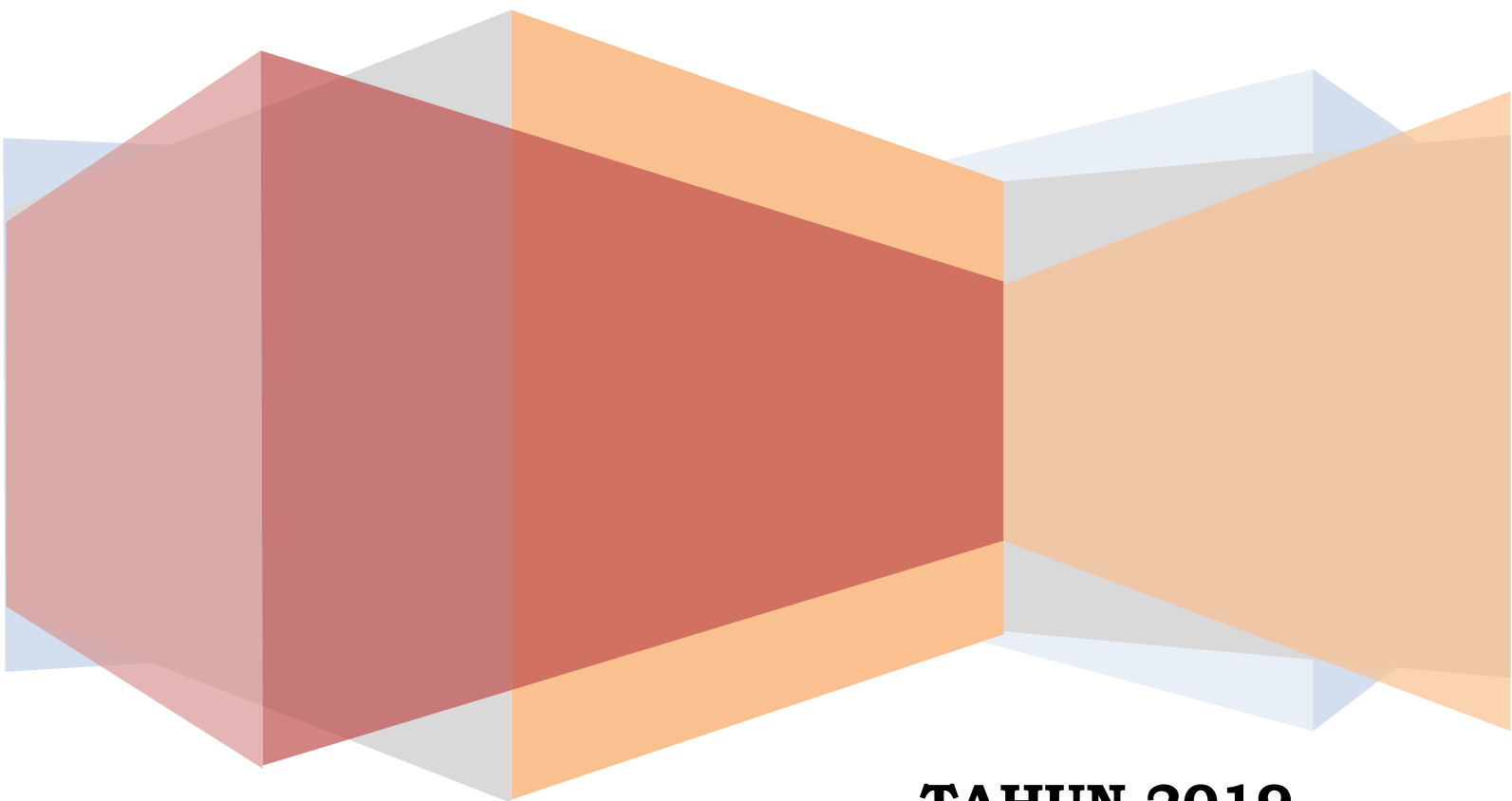




LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DPPKB KOTA BANDUNG



TAHUN 2019



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6
C. Tugas dan Fungsi.....	7
D. Isu Strategis.....	7
E. Landasan Hukum.....	7
F. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	12
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	13
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	14
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	16
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	18
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	19
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	31
BAB IV PENUTUP	32



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKB Kota Bandung Tahun 2019 dan maksud tujuan disusunnya LKIP adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;
2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat;
3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan
4. Media informasi tentang sejauhmana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan.

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pencapaian kinerja, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan.



Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung Tahun 2019 dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bandung, 30 Desember 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung



Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681115 198803 1 005



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan



akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1388 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - c. Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana.
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;
 - b. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia;
 - c. Kepala Seksi Ketahanan Remaja.
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Kependudukan;
 - b. Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - c. Kepala Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga.
7. Jabatan Pelaksana dan Fungsional.



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

D. Isu Strategis

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah revaluasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb Nomor 800/005-DPPKB/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan



bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. *Visi*

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

2. *Misi*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing (Misi 1)
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih (Misi 2)

3. *Tujuan dan Sasaran*

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek



dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023 sebanyak 5 (Lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	2500	2625	2757	2895	3040	
			Jumlah Kampung KB Aktif	14	26	38	49	58	
		Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	72.29	73.00	73.50	74.00	74.50	
			Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	71.06	74.56	78.26	82.16	86.26
				Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100	100	100	100
2	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	75	75.5	80	90	100	
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	42.72					



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun
2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	%	Anggota Kelompok Tribina yang ber KB MKJP	Jumlah Anggota Tribina ber-KB MKJP Dibagi Jumlah Anggota Tribina yang ber-KB x 100%	Jumlah Anggota Tribina (BKB, BKR, dan BKL) yang ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,



sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	2500
		Jumlah Kampung KB Aktif	14
2	Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	72.29
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	71.06
4	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100
5	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	42.72
6	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	75

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh



Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis

Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas

1. Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana
2. Meningkatnya Keluarga Berencana
3. Meningkatnya Ketahanan Keluarga.
4. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

-

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	jumlah	2500	2625	2757	2895	3040
			Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	14	26	38	49	58
		Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	72.29	73.00	73.50	74.00	74.50



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	71.06	74.56	78.26	82.16	86.26
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
2	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	%	60	70	80	90	100
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	%	42.72				

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam



mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 900/259 -DPPKB/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Formulasi Pengukuran
1	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	%	42.72	45.43	106.34	Jumlah Anggota Tribina ber-KB MKJP Dibagi Jumlah Anggota Tribina yang ber-KB x 100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Anggota Tribina yang ber-KB MKJP, dengan capaian kinerja 106.34 %.Melebihi dari target yang ditetapkan, dikarenakan adanya dukungan dari para petugas di lini lapangan yang terus berupaya dalam melaksanakan penyuluhan dan pendataan kepada anggota kelompok Tribina yang ber KB MJKP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

Perbandingan Capaian pada tahun sebelumnya tidak terukur, dikarenakan IKU dengan tahun sebelumnya berbeda, dimana IKU Tpada tahun 2018 ada sebanyak 3 Indikator Kinerja Utama dengan Capaian Melebihin Target, dikarenakan adanya dukungan dari para petugas di Lini Lapangan.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 6 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dari sebanyak 6 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah peserta KB baru	jumlah	2500	2500	100.00
2	Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	14	14	100.00
3	Persentase Peserta KB Aktif	%	72.29	75.28	104.14
4	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	71.06	71.06	100.00
5	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100.00
6	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	%	42.72	45.43	106.34
7	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	%	75	75	125.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	42.86 %
2	Sesuai Target	57.14 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 6 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	2	33.33	4	66.67	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	7	3	42.86	4	57.14	0	0.00

Dari sebanyak 6 sasaran dengan sebanyak 7 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	6	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	33.33 %
2	Sesuai Target	4	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah peserta KB baru	jumlah			0.00	2500	2500	100.00
2	Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah			0.00	14	14	100.00

Sasaran Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah peserta KB baru" adalah sebesar 2500 dari target sebesar 2500 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019



sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah peserta KB baru" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 82.24 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah Kampung KB Aktif" adalah sebesar 14 dari target sebesar 14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah Kampung KB Aktif" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 24.14 %.



Sasaran 2

Meningkatnya Keluarga Berencana

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Peserta KB Aktif	%			0.00	72.29	75.28	104.14

Sasaran Meningkatnya Keluarga Berencana dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Peserta KB Aktif" adalah sebesar 75.28 dari target sebesar 72.29 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104.14 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Peserta KB Aktif" tahun ini adalah sebesar 104.14 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 101.05 %.



Sasaran 3

Meningkatnya Ketahanan Keluarga.

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Ketahanan Keluarga.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%			0.00	71.06	71.06	100.00

Sasaran Meningkatkan Ketahanan Keluarga. dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelompok Tribina Aktif" adalah sebesar 71.06 dari target sebesar 71.06 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dari tahun sebelumnya target ini belum ada diakrenakan ada ditahun 2019 awal pertama Renstra, diharapkan tergetdapat lebih tercapai di tahun selanjutnya.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelompok Tribina Aktif" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 82.38 % pada tahun saat ini, pencapaian ditunjang adanya para petugas di lapangan dalam membantu program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.



Sasaran 4

Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Pengendalian Penduduk

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%			0.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Penduduk dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dari tahun sebelumnya sebanyak 100% maka peningkatan pada tahun saat ini sama 100% dari tingkat capainnya, dengan rumusan indicator pengukuran 2 Dokumen selama 12 Bulan yang harus terkumpul.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Keluarga

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas Keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	%			0.00	42.72	45.43	106.34

Sasaran Meningkatnya Kualitas Keluarga dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Anggota Tribina yang ber-KB MKJP" adalah sebesar 45.43 dari target sebesar 42.72 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106.34 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Sedangkan dibandingkan dari tahun sebelumnya tidak ada indicator target ini, indicator Anggota Tribina yang ber KB MKJP hanya ada indicator di Tahun 2019 dan menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Anggota Tribina yang ber-KB MKJP" tahun ini adalah sebesar 106.34 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 % ditahun sebelumnya dikarenakan indikator tidak ada ditahun sebelumnya.

Indikator Keberhasilan penguatan peran stakeholder sangat penting dalam penguatan kelembangaan di masyarakat, hususnya peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang saat ini terus melaksanakan penyuluhan dan KIE, sehingga peran serta keluarga ikut aktif dalam keberhasilan kelompok kelompok kegiatan dalam program Bangsa Kencana.



Sasaran 6

Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	%			0.00	75	75	125.00

Sasaran Meningkatkan Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik" adalah sebesar 75 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 125.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan, sehingga status indeks kepuasan masyarakat "Baik", untuk tahun selanjutnya diharapkan mampu meningkat sebanyak minimal 80% dari target yang ditetapkan, pencapaian ini di dukung dari beberapa responden yang ada di kewilayahan sebanyak 151 Kelurahan se Kota Bandung.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik" tahun ini adalah sebesar 125.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana maka capaian kerjanya mencapai 75.00 %.



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	jumlah	Target satuan Jumlah	Cukup Jelas	Ka Sub Program	Jumlah Akseptor KB Baru
		Jumlah Kampung KB Aktif	jumlah	Target Satuan Jumlah	Kriteria Aktif : 1. SK Kampung KB dari Lurah setempat 2. Adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB 3. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan KKBPK		Jumlah Kampung KB yang Aktif 1. SK Kampung KB dari Lurah setempat 2. Adanya kepengurusan kelompok di Kampung KB 3. partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan KKBPK
2	Meningkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	Adanya Persentase PUS KB Aktif	Jumlah PUS KB Aktif dibagi Jumlah PUS dikali 100%		Persentase PUS yang ber KB Aktif
3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga.	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	Kelompok Tribina tidak Semua aktif	Jumlah Kelompok Tribina yang Aktif dibagi Jumlah Kelompok Tribina x 100%		Persentase Kelompok Tribina yang Aktif Kriteria Aktif : 1. Memiliki SK Kelompok 2. Memiliki Susunan Kepengurusan 3. Aktif ber-Kegiatan Minimal rutin 1 (satu) bulan sekali 4. Adanya kelompok2 ketahanan keluarga 5.



Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

							Sosialisasi dan penyuluhan
4	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	Laporan Data dan Informasi Keluarga yang akurat harus 100% setiap bulan	Jumlah Laporan dibagi jumlah Bulan pertahun dikali 100%		Jumlah Laporan Dokumen Statistik Rutin KB
5	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat baik	%	Point IKM baik	Cukup Jelas		Point IKM Meningkat
6	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	%	Anggota Kelompok Tribina yang ber KB MKJP	Jumlah Anggota Tribina ber-KB MKJP Dibagi Jumlah Anggota Tribina yang ber-KB x 100%		Jumlah Anggota Tribina (BKB, BKR, dan BKL) yang ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun
2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Promosi keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Baru	Jumlah	2500
2		Jumlah Kampung KB Aktif	Jumlah	20
3	Meingkatnya Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	72.29
4	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina Aktif	%	71.06
5	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100
6	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Anggota Tribina yang ber-KB MKJP	%	42.72
7		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasa Masyarakat Baik	\$	70

Target Indikator Kinerja Utama Ini setelah di reviu, hasilnya tetap sama yaitu Sasaran Meningkatkan Kualitas Keluarga menjadi Indikator Kinerja Anggota Tribina yang ber KB MKJP dengan Target 42.72 % pada tahun 2019 jadi tidak ada perbaikan, hanya perlu untuk di tambahkan IKU pada tahun selanjutnya, ditambahkan beberapa indicator yang menunjang tugas dan fungsi Dinas. Sehingga target pencapaian RPJMD Kota Bandung Lebih Optimal.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.14 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106.34 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.830.438.782 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.487.932.905, dengan



demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.342.505.877

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104.14 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106.34 %
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 13.830.438.782 (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah 75.83 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 30 Desember 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung

Drs. H. ANDRI DARUSMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681115 198803 1 005

